

Pengaruh Struktur Ekonomi Daerah dan Investasi Asing terhadap Pertumbuhan Inklusif di Indonesia

Puja Kurnia¹, Selli Nelonda²

^{1,2} Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Korespondensi: kurniapuja963@gmail.com, sellinelonda@gmail.com

Info Artikel

Diterima:

15 Mei 2025

Disetujui:

16 Juni 2025

Terbit daring:

25 Juni 2025

DOI: -

Sitasi:

Kurnia, P. & Nelonda, S. (2025). Pengaruh Struktur Ekonomi Daerah dan Investasi Asing terhadap Pertumbuhan Inklusif di Indonesia.

Abstract:

Since the 1998 monetary crisis, Indonesia's economy has grown positively, but its distribution is still uneven, especially for low-income groups. This study analyzes the influence of regional economic structure and foreign investment on inclusive growth in Indonesia for the 2019–2023 period using panel data from 34 provinces and the Fixed Effect Model (FEM) method. The results show that the trade, Foreign Investment (FDI), and education sectors have a significant positive effect, while the services sector has a negative effect on inclusive growth. The agriculture, mining, industry, and ICT skills sectors have no significant effect. These findings underscore the importance of strengthening trade, education, and the optimization of foreign investment to drive more equitable growth.

Keywords: Regional Economic Structure, Foreign Investment, Inclusive Growth, ICT, Education.

Abstrak:

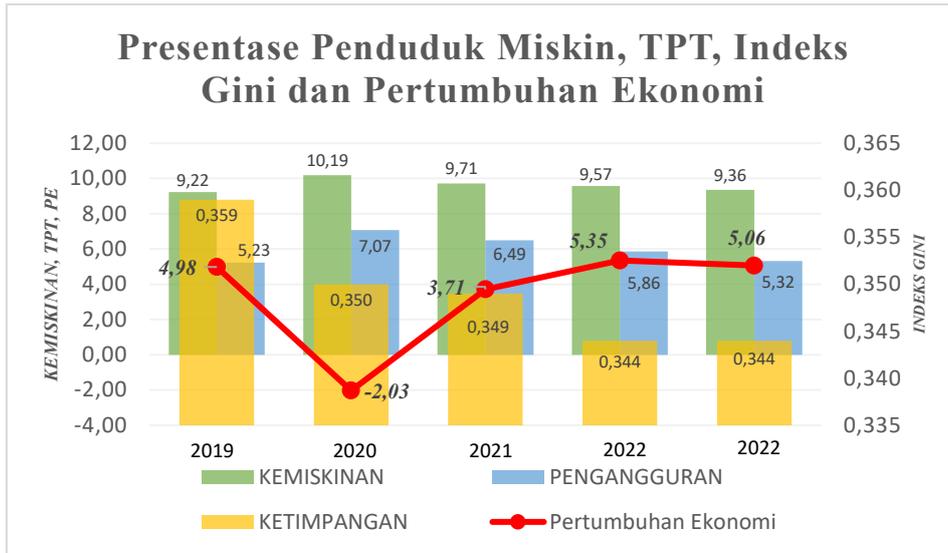
Sejak krisis moneter 1998, ekonomi Indonesia tumbuh positif, namun distribusinya masih belum merata, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Penelitian ini menganalisis pengaruh struktur ekonomi daerah dan investasi asing terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia periode 2019–2023 menggunakan data panel 34 provinsi dan metode *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil menunjukkan bahwa sektor perdagangan, Penanaman Modal Asing (PMA), dan pendidikan berpengaruh positif signifikan, sementara sektor jasa berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan inklusif. Sektor pertanian, pertambangan, industri, dan keterampilan TIK tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan pentingnya memperkuat perdagangan, pendidikan, dan optimalisasi investasi asing untuk mendorong pertumbuhan yang lebih merata.

Kata Kunci: Struktur Ekonomi Daerah, Investasi Asing, Pertumbuhan Inklusif, TIK, Pendidikan.

Kode Klasifikasi JEL: F35, O24, F43

PENDAHULUAN

Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pendapatan riil nasional menunjukkan pertumbuhan ekonomi, yang sejak lama telah menjadi indikator utama pembangunan wilayah Indonesia (Sukirno 2008). Sejak krisis moneter 1998, ekonomi Indonesia telah tumbuh rata-rata 5% per tahun. Namun, belum dibarengi dengan pembagian hasil yang merata, khususnya bagi orang-orang dengan pendapatan rendah. Pandemi Covid-19 memperburuk masalah ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan kemiskinan. Konsep pertumbuhan inklusif sangat relevan dalam konteks ini karena menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar hasil pembangunan dapat diterima secara wajar (Klasen, 2017).

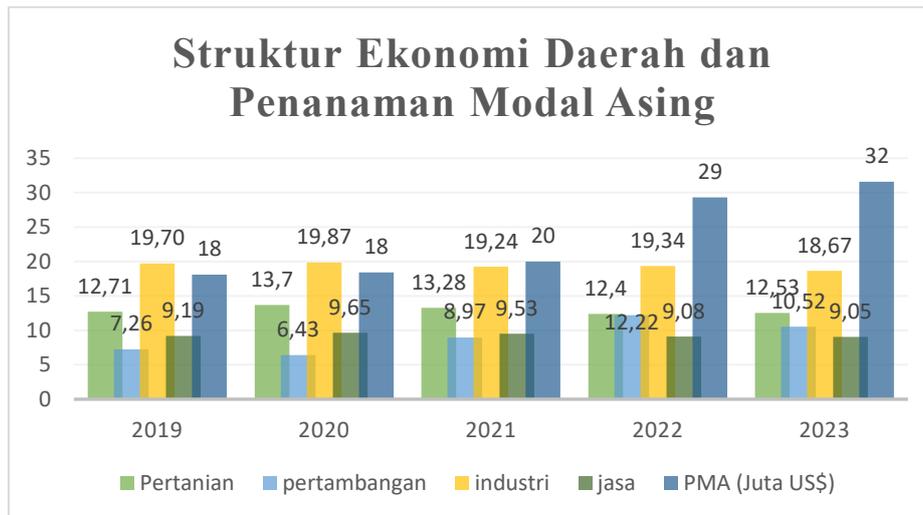


Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik)

Grafik 1 Kemiskinan, TPT, Indeks Gini dan Pertumbuhan Ekonomi

Selama periode 2019 hingga 2023, indikator sosial dan ekonomi di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan. Pandemi COVID-19 menyebabkan lonjakan angka kemiskinan pada tahun 2020, seperti yang ditunjukkan pada Grafik 1, naik dari 9,22% menjadi 10,19%. Namun, angka tersebut secara bertahap menurun hingga mencapai 9,36% pada tahun 2023, yang masih jauh dari tingkat sebelum pandemi. Dengan cara yang sama, tingkat pengangguran meningkat tajam dari 5,23% pada tahun 2019 menjadi 7,07% pada tahun 2020; namun, pada tahun 2023, tingkat pengangguran mulai menurun dan kembali menjadi 5,32%. Meskipun demikian, ketimpangan pendapatan yang dihitung dengan koefisien *Gini* turun dari 0,359 menjadi 0,344 pada waktu yang sama, yang menunjukkan peningkatan tetapi belum menunjukkan pemerataan distribusi pendapatan ideal. Grafik ini menjadi landasan penting dalam penelitian untuk menelaah kontribusi sektor ekonomi dan penanaman modal asing terhadap indeks pertumbuhan inklusif di Indonesia.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami guncangan tajam akibat pandemi. Dari pertumbuhan positif sebesar 4,98% pada 2019, ekonomi mengalami kontraksi menjadi -0,203 % pada tahun 2020. Namun, ekonomi segera pulih, dengan kenaikan stabil sebesar 5,06% pada tahun 2023. Data menunjukkan, bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Ini sejalan dengan penelitian Kurniasih (2018), yang menyatakan bahwa meskipun ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan masalah sosial, dampak pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Oleh karena itu, kebijakan yang secara khusus berfokus pada masalah sosial ekonomi diperlukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang benar-benar merata dan inklusif (Kunenengan, 2023).



Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik)

Grafik 2 Struktur Ekonomi dan PMA

Selama periode 2019-2023 industri terus menjadi penggerak utama untuk menarik investasi, dengan puncaknya pada tahun 2020 sebesar 19,87%. Namun, sektor pertanian dan perdagangan tetap stabil dengan kontribusi tahunan sekitar 12-13%, dan sektor jasa mencatat kontribusi antara 9,05% dan 9,65%. Penanaman modal asing (PMA) juga meningkat signifikan dari 5,6% pada tahun 2019 menjadi 9,65% pada tahun 2020. Data ini menunjukkan kecenderungan investor untuk lebih banyak menginvestasikan lebih banyak uang di bidang ini daripada di bidang lainnya. Namun, pencapaian kesejahteraan ekonomi yang merata tidak selalu disertai dengan peningkatan investasi di bidang tertentu. Akibatnya, penting untuk melihat kontribusi sektor ekonomi dari sudut pandang inklusivitas. Selain faktor struktural, kualitas modal manusia juga merupakan komponen yang menentukan inklusif atau tidaknya suatu pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur kapasitas produktif masyarakat, indikator seperti penguasaan teknologi informasi dan tingkat kelulusan sekolah menengah atas sangat penting. Untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, mendapatkan pekerjaan modern, dan mendapatkan akses ke layanan dan informasi pembangunan. Sejalan dengan hal ini, studi dari Alekhina dan Ganelli (2023) dan Andrawina et al. (2024) menunjukkan bahwa penguasaan teknologi meningkatkan produktivitas dan meningkatkan partisipasi ekonomi kelompok rentan.

Selain itu, pendidikan menengah atas dianggap sebagai syarat minimum untuk mendorong mobilitas sosial dan pendapatan pekerjaan yang layak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dan Setiadi (2019), pendidikan sangat penting untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan, yang merupakan dua komponen utama indeks pertumbuhan inklusif. Sayangnya, perbedaan pendidikan dan akses ke pelatihan teknologi masih menjadi masalah, terutama di daerah perdesaan. Data BPS menunjukkan bahwa ada perbedaan besar di antara wilayah dalam hal akses TIK dan tingkat kelulusan SMA. Dalam jangka panjang sebagaimana dijelaskan oleh Aimon et al. (2020) dan Destek dan Sinha (2020), pembangunan manusia melalui pendidikan dan teknologi memiliki potensi besar untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang masalah dan beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan : (i) Bagaimana kontribusi sektor pertanian, pertambangan, industri, jasa, dan perdagangan terhadap indeks pertumbuhan inklusif di Indonesia ? (ii) Bagaimana peran Penanaman Modal Asing (PMA) mempengaruhi pertumbuhan inklusif ? (iii) Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat dan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mampu memperkuat pertumbuhan inklusif ?

Teori pertumbuhan ekonomi Solow yang dikembangkan oleh Robert M. Solow (1956), yang menekankan bahwa akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi adalah faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Model ini bergantung pada fungsi Cobb-Douglas, dengan persamaan :

$$[Y = F(K,L)] \quad (1)$$

Dimana Y adalah output, K adalah modal, dan L adalah tenaga kerja. Teori ini menunjukkan bahwa meskipun modal dan tenaga kerja terbatas, pertumbuhan output jangka panjang bergantung pada teknologi. Solow juga mengusulkan ide Steady-State, yang berarti ketika pertumbuhan modal per pekerja mencapai titik stabil. Penelitian yang dilakukan oleh Mankiw, Romer, dan Weil (1992) menegaskan betapa pentingnya mengumpulkan modal untuk meningkatkan pendapatan regional.

Jalan dan kualitas pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara signifikan oleh struktur ekonomi suatu wilayah. Dibandingkan dengan daerah yang masih bergantung pada sektor primer, daerah dengan sektor sekunder dan tersier yang dominan cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Kemajuan pembangunan ditunjukkan oleh pergeseran ekonomi dari sektor pertanian dan pertambangan ke sektor jasa dan industri (Tambunan, 2020). Dalam situasi seperti ini, sumber daya dapat ditingkatkan secara keseluruhan dengan, dengan memindahkan mereka ke sektor yang lebih efisien yang memiliki tingkat produktivitas yang lebih rendah (Mankiw et al., 1992). Ini dijelaskan oleh model “*dual sektor*”, yang menggambarkan pergeseran tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern (Lewis, 1954). Menurut Chenery (1960), diversifikasi dan perubahan struktur ekonomi yang tepat dapat mempercepat pertumbuhan jangka panjang jika didukung oleh kebijakan yang mendorong integrasi antar sektor. Menurut kurva Kuznets (1955), transformasi ini menyebabkan penurunan ketimpangan pendapatan dalam jangka panjang. Kurva ini menunjukkan bahwa ketimpangan cenderung meningkat pada awal pertumbuhan ekonomi, tetapi menurun saat pendapatan meningkat dan pemerataan struktur ekonomi meningkat. Oleh karena itu, agar manfaatnya dirasakan secara luas, perubahan struktur ekonomi harus dilakukan secara inklusif (Abadi, 2020).

Investasi asing langsung (FDI) meningkatkan stok modal nasional dan mempercepat transfer teknologi dan pembukaan lapangan kerja, memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Sari et al., (2016), FDI akan menjadi lebih efektif jika didukung oleh inovasi dan pengembangan teknologi. Selain itu Basri & Hill, (2021) menyatakan bahwa untuk memaksimalkan dampak FDI terhadap pertumbuhan inklusif, reformasi kelembagaan, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal sangat penting. Konsep pembangunan ekonomi yang disebut pertumbuhan inklusif tidak hanya berfokus pada peningkatan PDB tetapi juga menekankan pentingnya pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat. Paul Romer (1990) menyatakan bahwa pertumbuhan yang ideal harus disertai dengan peningkatan kualitas hidup, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja baru. Dalam perspektif ini, pertumbuhan inklusif didefinisikan sebagai proses yang memastikan partisipasi masyarakat yang luas dalam pembangunan dan pembagian hasil pembangunan secara merata (Soares & Ramos, 2013).

Menurut OECD, pertumbuhan inklusif harus memungkinkan kelompok rentan untuk merasakan manfaat ekonomi. Hal ini sejalan dengan tujuan SDG 1,8, dan 10 yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, memberikan pekerjaan yang layak, dan mengurangi ketimpangan (Destek & Sinha, 2020). Konsep pertumbuhan berbasis luas, yang diusulkan oleh Klasen dan dikuatkan oleh Bappenas dan McKinley (2010), menekankan pentingnya pembagian peluang ekonomi secara non-diskriminasi. Menurut Ali dan Zhuang (2007), strategi pertumbuhan inklusif terdiri dari dua pilar utama : inklusi sosial yang menjamin akses setara terhadap kesempatan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Teori pertumbuhan inklusif menambah elemen keadilan distribusi dan akses yang merata ke dalam proses

pertumbuhan yang berkelanjutan dan menyeluruh. Ini berbeda dengan teori Solow, yang menunjukkan akumulasi modal, tenaga kerja, dan teknologi sebagai mesin pertumbuhan.

Teori Pertumbuhan Endogen dikembangkan oleh Paul Romer (1986, 1990) dan Robert E. Lucas (1988) yang menyatakan bahwa faktor internal seperti inovasi, teknologi, dan modal manusia memacu pertumbuhan ekonomi. Output ekonomi dari model Romer dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = [A(K, L, H)] \quad (2)$$

Di mana Y adalah Output, A adalah teknologi endogen, K adalah modal fisik, L adalah tenaga kerja, dan H adalah modal manusia, seperti keterampilan digital dan pendidikan. Ramadhan dan Setiadi (2019) menunjukkan bahwa, dalam kaitannya dengan pertumbuhan inklusif, pendidikan menengah atas memiliki peran strategis dalam membentuk tenaga kerja produktif dan berdaya saing. Selain itu, menurut Alekhina dan Ganelli (2023) dan Andrawina et al. (2024), penguasaan TI telah mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN karena memperluas akses masyarakat terhadap pasar kerja, pengetahuan, dan inovasi. Oleh karena itu, pendidikan dan teknologi informasi (TIK) adalah penggerak utama pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dari perspektif pertumbuhan endogen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dan induktif. Hasil analisis dalam penelitian ini menggunakan Microsoft Excel 2021 dan Stata-14. Penelitian ini menggunakan data sekunder *cross-section time series* dengan data 34 provinsi di Indonesia dalam 5 tahun (2019-2023) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi data, studi kepustakaan melalui buku, jurnal, dan artikel lainnya. Penelitian ini menggunakan analisis Regresi Data Panel untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
Variabel Dependen		
<i>IGI (Indeks Inclusive Growth)</i>	Pertumbuhan inklusif (pertumbuhan ekonomi yang mengatasi permasalahan sosial-ekonomi)	Indeks (%)
Variabel Independen		
<i>Agriculture</i>	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.	Distribusi (%)
<i>Mining</i>	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB.	Distribusi (%)
<i>Industry</i>	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.	Distribusi (%)
<i>Service</i>	Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB.	Distribusi (%)
<i>Trade</i>	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.	Distribusi (%)
<i>FDI</i>	Proporsi investasi asing terhadap PDRB.	Rasio (%)
Variabel Kontrol		
<i>ICT</i>	Keterampilan TIK (persentase angkatan kerja dengan keahlian TIK).	Persentase (%)
<i>Education</i>	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi (SMA/Sederajat)	Persentase (%)

Tabel 1 Definisi Operasional

Mengacu pada konsep pertumbuhan inklusif yang terdiri dari 3 indikator yaitu kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan, maka ketiga indikator dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$1) \text{ Indeks Inklusif dalam menurunkan kemiskinan} \quad (3)$$

$$IG_p = (E_{pg} / E_p) G_G$$

$$2) \text{ Indeks Inklusif dalam menurunkan pengangguran} \quad (4)$$

$$IG_{em} = (E_{emg} / E_{em}) G_G$$

$$3) \text{ Indeks Inklusif dalam menurunkan ketimpangan pendapatan} \quad (5)$$

$$IG_{in} = (E_{ing} / E_{in}) G_G$$

Di mana :

- IG_p = Pertumbuhan Inklusif pada Kemiskinan
- E_p = Elastisitas kemiskinan terhadap pengeluaran rata-rata
- E_{pg} = Elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi
- G_g = Pertumbuhan ekonomi
- IG_{em} = Pertumbuhan Inklusif pada Pengangguran
- E_{em} = Elastisitas TPT terhadap jumlah pekerja
- E_{emg} = Elastisitas TPT terhadap pertumbuhan ekonomi
- IG_{in} = Pertumbuhan Inklusif dalam Ketimpangan Pendapatan
- E_{in} = Elastisitas Indeks *Gini* terhadap 60% pengeluaran terendah
- E_{ing} = Elastisitas Indeks *Gini* terhadap pertumbuhan ekonomi

Untuk menghitung indeks inklusif adalah sebagai berikut :

$$IGI = \frac{(IG_p + IG_{em} + IG_{in})}{3} \quad (6)$$

Pertumbuhan dapat dikatakan inklusif, apabila nilai dari $IGI \geq G_g$

Berdasarkan kerangka konseptual dan definisi operasional, model matematis untuk model regresi data panel yang menggunakan pendekatan ekonometrik ditulis sebagai berikut :

$$IGI = \beta_0 + \beta_1 (Agriculture_i) + \beta_2 (Mining_i) + \beta_3 (Industry_i) + \beta_4 (Services_i) + \beta_5 (Trade_i) + \beta_6 (FDI_i) + \beta_7 (ICT_i) + \beta_8 Edu_i + \mu_{it} \quad (7)$$

Di mana:

- IGI = Indeks Pertumbuhan Inklusif di Indonesia
- $Agriculture$ = Sektor Pertanian
- $Mining$ = Sektor Pertambangan
- $Industry$ = Sektor Industri
- $Services$ = Sektor Jasa
- $Trade$ = Sektor Perdagangan
- FDI = Penanaman Modal Asing
- ICT = Keterampilan TIK
- $Education$ = Pendidikan
- β = konstanta
- $\beta_1 - \beta_8$ = koefisien
- i = Provinsi – Provinsi yang ada di Indonesia
- t = tahun (2019–2023)
- U_{it} = sisa persamaan jangka Panjang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia sempat tertekan hebat oleh pandemi COVID-19 pada tahun 2020, tetapi mulai menunjukkan pemulihan pada periode 2021–2023. Indeks Pertumbuhan Inklusif (IPI) nasional rata-rata berada di kisaran 3,6–3,9, menandakan

adanya upaya menjaga pemerataan manfaat ekonomi di seluruh provinsi. Namun, tekanan pandemi mengguncang keseimbangan tersebut, memaksa banyak daerah untuk menyesuaikan kebijakan fiskal, program bantuan sosial, dan stimulus sektor riil agar pertumbuhan tidak hanya berpusat di kelompok usaha besar atau wilayah perkotaan.

Terdapat sepuluh provinsi dengan capaian IPI tertinggi Sulawesi Utara (4,18), Sulawesi Selatan (3,72), Bengkulu (3,68), DKI Jakarta (3,61), Kalimantan Utara (3,58), Jawa Timur (3,56), Gorontalo (3,54), Sulawesi Tenggara (3,52), Jambi (3,15), dan Jawa Tengah (3,25) umumnya berhasil menyeimbangkan laju pertumbuhan ekonomi (IPE) dengan pemerataan kesejahteraan. Provinsi-provinsi ini menonjol karena konsistensi IPI yang mendekati atau melebihi IPE nasional, menunjukkan bahwa kebijakan pro-rakyat, diversifikasi sektor termasuk padat karya seperti pertanian dan perdagangan serta upaya peningkatan akses layanan dasar mampu menopang inklusivitas pertumbuhan. Sebaliknya, sepuluh provinsi dengan IPI terendah Papua (1,84), NTB (2,03), NTT (2,07), DI Yogyakarta (2,07), Aceh (2,27), Sumatera Barat (2,32), Riau (2,43), Kalimantan Tengah (2,44), Kalimantan Timur (2,47), dan Sulawesi Tengah (2,47) diwarnai tantangan struktural yang berat. Ketimpangan ekstrem di Papua, ketergantungan pada industri besar di NTB dan Riau, serta kekurangan infrastruktur sosial di Kalimantan Tengah memperlihatkan bahwa tanpa intervensi khusus seperti peningkatan kapasitas lokal, pemerataan investasi, dan perbaikan layanan dasar pertumbuhan tidak akan berdampak merata. Kondisi ini menuntut strategi pembangunan yang lebih terfokus pada pemberdayaan wilayah tertinggal dan pelibatan aktif masyarakat setempat.

Temuan ini menegaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis menjadi keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan. Dengan memasukkan dimensi inklusivitas melalui IPI, dapat menilai kualitas pertumbuhan secara lebih komprehensif, memperhatikan sejauh mana manfaat ekonomi menjadi penting untuk mengetahui apakah sektor padat karya seperti pertanian, pertambangan, industri, jasa dan perdagangan, atau padat modal seperti pertambangan dan keuangan yang menjadi motor penggerak PDRB dalam mendukung pertumbuhan inklusif. Untuk mengetahui pengaruh dari struktur ekonomi daerah dan investasi asing, penelitian ini menggunakan metode Analisis Regresi Data Panel, dengan menggunakan data *cross-section* dan *time series* yang terdiri dari 34 Provinsi di Indonesia dari tahun 2019-2023. Dari hasil analisis statistik menggunakan *Fixed Effect Model*, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut :

Variable	Coefficient	Robust Std.Error	t-Statistic	Prob
agriculture	-0.2558	0.4221	-0.61	0.549
mining	-0.0373	0.1398	-0.27	0.791
industry	-0.0438	0.1773	-0.25	0.806
service	-2.4415***	0.5362	-4.55	0.000
trade	1.2649**	0.3321	3.81	0.001
fdi	1.1239**	0.3159	3.56	0.001
ict	-0.0244	0.0212	-1.15	0.259
education	0.2423***	0.0607	3.99	0.000
_cons	-15.3046	142.358	-1.08	0.444
R-squared (within)				0.4689
R-squared (overall)				0.0136
F-statistik				22.13
Prob > F				0.0000
Keterangan	***;signifikan pada alpha 1%	**;signifikan pada alpha 5%	*;signifikan pada alpha 10%	

Sumber : Hasil Olahan Data Stata14

Tabel 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas-robust standard errors

Berdasarkan hasil estimasi, model regresi pertumbuhan ekonomi inklusif (IGI) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IGI_{it} = -15,305 - 0,256Agri_{it} - 0,037Mining_{it} - 0,044Industry_{it} - 2,442Service_{it} + 1,265Trade_{it} + 1,124FDI_{it} - 0,024ICT_{it} + 0,242Edu_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it} \quad (8)$$

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah 22,13 yang melebihi nilai F tabel sebesar 2,20 pada tingkat signifikansi 5% dan 1%. Nilai *p-value* yang diperoleh 0,000 yang menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa variabilitas indeks pertumbuhan inklusif dipengaruhi oleh kombinasi delapan variabel: pertanian, pertambangan, industri, jasa, perdagangan, FDI, teknologi informasi, dan pendidikan. Dari delapan variabel tersebut, setidaknya empat memiliki pengaruh signifikan dan berfungsi sebagai dasar untuk pembuatan strategi pembangunan yang berfokus pada inklusi ekonomi secara luas. Hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa delapan variabel yang digunakan memiliki pengaruh 46,89% di mana hampir setengah dari variasi indeks pertumbuhan inklusif. Faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini mempengaruhi 53,11% dari total variasi. Meskipun temuan ini menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan dengan baik, masih ada banyak ruang untuk menemukan faktor-faktor eksternal tambahan yang mendukung pertumbuhan inklusif di Indonesia. Hal-hal seperti ketimpangan spasial, stabilitas politik, dan kebijakan fiskal adalah hal-hal yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Pengaruh masing-masing variabel terhadap indeks pertumbuhan inklusif secara keseluruhan diukur melalui uji t parsial. Sektor jasa ($t = -4,55$; $p = 0,000$) memiliki pengaruh negatif signifikan, dengan kenaikan 1% justru menurunkan indeks sebesar 2,44%. Sebaliknya, sektor perdagangan ($t = 3,81$; $p = 0,001$) dan investasi asing langsung atau FDI ($t = 3,56$; $p = 0,001$) memiliki pengaruh positif signifikan, dengan kenaikan 1% masing-masing mampu mendorong kenaikan indeks sebesar 1,26% dan 1,12%. Pendidikan juga menunjukkan pengaruh positif ($t = 3,99$; $p = 0,000$) dengan kontribusi 0,24% per peningkatan 1% dalam penyelesaian pendidikan SMA. Sebaliknya, sektor pertanian, pertambangan, industri, serta penguasaan TIK oleh masyarakat tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan inklusif. Hasil ini menunjukkan pentingnya memperkuat sektor perdagangan, pendidikan, dan menarik investasi luar negeri sebagai pendorong inklusi ekonomi nasional.

Sektor pertanian hingga kini belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif secara signifikan. Banyak subsektor pertanian masih beroperasi sebagai unit terpisah dengan produktivitas rendah karena sangat tergantung pada kondisi alam dan minimnya adopsi teknologi. Misalnya, subsektor perkebunan menyumbang sekitar 30–35% dari total produksi pertanian, tetapi keuntungan terbesar justru dinikmati korporasi besar; petani hanya memperoleh sekitar 10% dari nilai ekspor CPO, sementara mayoritas pekerja di lapangan berstatus buruh harian tanpa jaminan sosial. Hal ini menciptakan celah di mana peningkatan output ekonomi tidak diikuti oleh perbaikan kesejahteraan. Berdasarkan model Solow, tanpa investasi dan adopsi teknologi yang memadai, produktivitas tidak akan meningkat, sehingga pertumbuhan tidak bersifat inklusif. Kasus serupa terlihat pada sektor pertambangan di Kalimantan Timur, meski PDRB per kapita mencapai Rp 160,11 juta pada 2020, angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, menunjukkan “pertumbuhan tanpa perkembangan”. Di samping itu, karakter kapital-intensif sektor ini menjadikan manfaat ekonomi sulit tersebar ke masyarakat lokal.

Di ranah industri, dominasi perusahaan besar dan minimnya tenaga kerja lokal terampil membatasi peran sektor ini dalam mempersempit kesenjangan. Disparitas regional pun memperparah, seperti di Jawa Barat yang masih mencatat tingkat pengangguran tinggi meski memiliki basis industri berkembang. Solow menekankan bahwa kemajuan produktivitas memerlukan teknologi dan modal manusia; namun implementasinya di industri Indonesia belum optimal. Sektor jasa walaupun memberikan kontribusi besar terhadap PDB

justru banyak dikuasai oleh kegiatan informal dan berproduktivitas rendah, seperti perdagangan kecil dan transportasi mikro. Menurut Hartati (2021), perdagangan hanya memberikan andil 2,50 % pada indeks inklusi, serta kesenjangan akses layanan antara perkotaan dan pedesaan semakin melebar.

Sebaliknya, sektor perdagangan modern yang melibatkan banyak UMKM, padat karya, dan tersebar merata, menunjukkan kapasitas nyata dalam mendorong inklusi. Purwanti dan Rahmawati (2021) menemukan kontribusi sektor ini mencapai 0,74 % pada indeks inklusi, melampaui sektor korporasi besar. Di Nusa Tenggara Timur, perdagangan bahkan menyumbang 9,64 % terhadap PDRB, membantu kelompok kurang beruntung. Dalam perspektif Solow, distribusi barang yang efisien dan penggunaan teknologi sederhana meningkatkan total faktor produktivitas. Selain itu, masuknya investasi asing langsung (FDI) ke sektor industri dan logistik seperti studi Fitrianasari (2021) di Kalimantan Timur, terbukti meningkatkan indeks inklusi, karena FDI memupuk akumulasi modal fisik dan teknologi sesuai teori Solow.

Walaupun infrastruktur digital di Indonesia berkembang pesat, dampaknya pada inklusi melalui TIK masih terbatas. Literasi digital nasional baru 28 %, dengan kesenjangan tinggi—IP-TIK Papua hanya 39,18, jauh di bawah Jakarta yang 85,72 (BPS, 2022). Menurut Romer, teknologi yang didukung modal manusia dan inovasi lokal akan mendorong pertumbuhan; namun ekosistem digital kita belum optimal dalam menciptakan nilai ekonomi. Sebaliknya, investasi pada pendidikan terbukti menjadi kunci inklusi: Fitrianasari et al. (2022) menunjukkan bahwa peningkatan belanja pendidikan berkorelasi positif dengan indeks inklusi. Provinsi berlama sekolah tinggi, seperti Yogyakarta, memiliki tingkat inklusi lebih baik (BPS, 2022). Dalam kerangka Romer, pendidikan sebagai investasi sosial memperkuat modal manusia dan memacu inovasi dari dalam sistem ekonomi.

SIMPULAN

Penelitian ini menilai pengaruh struktur ekonomi daerah terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia selama 2019–2023, dengan indikator utama: kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Hasil menunjukkan bahwa sektor pertanian, pertambangan, dan industri belum berkontribusi signifikan terhadap inklusi ekonomi, meskipun punya peran besar dalam PDRB. Hal ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas dan distribusi manfaat yang tidak merata. Sektor jasa menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan, terutama karena dominasi jasa informal yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Sebaliknya, sektor perdagangan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan inklusif, utamanya melalui aktivitas UMKM yang menyerap tenaga kerja dan menjangkau daerah. FDI juga berkontribusi positif melalui penciptaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur. Dari aspek sumber daya manusia, penguasaan TIK belum berpengaruh signifikan akibat kesenjangan digital antarwilayah. Namun, pendidikan, khususnya tingkat menengah, terbukti berperan dalam meningkatkan inklusi ekonomi. Oleh karena itu, arah pembangunan ke depan perlu menitikberatkan pada sektor dengan efek distribusi nyata, bukan hanya pada peningkatan output ekonomi.

Pemerintah perlu memprioritaskan sektor yang terbukti mendukung pertumbuhan inklusif, seperti perdagangan, pendidikan, dan investasi asing. UMKM perlu didukung melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan integrasi rantai pasok. Perluasan akses pendidikan di wilayah tertinggal juga penting untuk pemerataan ekonomi. Untuk penelitian lanjutan, disarankan menambahkan variabel seperti infrastruktur, literasi keuangan, dan kualitas institusi. Penggunaan data spasial atau model non-linear dapat memberi gambaran yang lebih rinci tentang dinamika ketimpangan di tingkat lokal dan jangka panjang.

DAFTAR RUJUKAN

- Abadi, D. R. (2020). Transformasi Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Empat Kabupaten Di Wilayah Madura Pada Tahun 2010-2019. *Media Trend*, 15(2), 359–375. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v15i2.8102>
- Aimon, H., Kurniadi, A. P., & Satrio, M. K. (2020). Analysis of Inclusive Growth in Poverty, Unemployment and Income Inequality in West Sumatera Province: Panel Error Correction Model Approach. *Jurnal Benefita*, 5(1), 19. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4901>
- Alekhina, V., & Ganelli, G. (2023). Determinants of inclusive growth in ASEAN. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 28(3), 1196–1228. <https://doi.org/10.1080/13547860.2021.1981044>
- Ali, I., & Zhuang, J. (2007). Inclusive growth toward a prosperous Asia: Policy implications. *ERD Working Paper Series*, 97. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4921562>
- Andrawina, K. E., Rahayu, S. A. T., & Hakim, L. (2024). Peran Kunci: Teknologi, Human Capital, dan FDI Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Teori Endogen. *Humaniorum*, 2(1), 7–13. <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.22>
- Basri, M. C., & Hill, H. (2021). Indonesian Economic Development: Building Institutions for Better Growth. *Indonesia Journal of Development Studies*, 10(1), 25–45.
- Chenery, H. B. (1960). "Patterns of Development, 1950 to 1960." *The American Economic Review*, 50(2), 357–366.
- Destek, M. A., & Sinha, A. (2020). Renewable, non-renewable energy consumption, economic growth, trade openness and ecological footprint: Evidence from organisation for economic Co-operation and development countries. *Journal of Cleaner Production*, 242. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118537>
- Fitrianasari, R. N. (2021). Analisis Dampak Globalisasi, Kebijakan Fiskal dan Modal Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Studi Kasus Dengan Data Panel Pada 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal BESTARI: Buletin Statistika Dan Aplikasi Terkini*, 1(2), 29–38.
- Fitrianasari, R. N., Chotimah, K., & Amida, O. V. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Makroekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2015-2020. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 92–106.
- Klasen, S. (2017). Measuring and monitoring inclusive growth in developing and advanced economies: Multiple definitions, open questions and some constructive proposals. In *Reframing Global Social Policy: Social Investment for Sustainable and Inclusive Growth* (pp. 123–144). <https://doi.org/10.56687/9781447332503-010>
- Kunenengan, R. M. ., Engka, D. S. ., & Rorong, I. P. F. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Lima Kabupaten/Kota Di Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(3), 133–144.
- Kurniasih, E. P., & Dosinta, N. F. (2018). Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Mengatasi Masalah Pembangunan. *Seminar Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan 2018 (SATIESP 2018)*, 2014, 50–59.
- Kuznet, S. (1955). Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1–28.
- LEWIS, W. A. (1954). Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. *The Manchester School*, 22(2), 139–191. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x>

- Mankiw Gregory, N., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 107(2), 407–437. <https://doi.org/10.2307/2118477>
- McKinley, T. (2010). Inclusive growth criteria and indicators: an inclusive growth index for diagnosis of country progress. *Asian Development Bank Working Paper*, 14.
- Purwanti, S. D., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia. *Ecoplan*, 4(1). <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i1.231>
- Ramadhan, R. R., & Setiadi, Y. (2019). Pengaruh Modal Fisik dan Sumber Daya Manusia terhadap Indeks Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(2), 109–124. <https://doi.org/10.29259/jep.v17i2.9797>
- Robert E. Lucas, J. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3–42. <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0304393288901687>
- Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002–1037. doi: 10.1086/261420
- Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71–S102. <https://doi.org/10.3386/w3210>
- Sari, M., Syechalad, M. N., & Majid, S. A. (2016). Pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 3(November), 109–115.
- Soares, F. V., & Ramos, R. (2013). *Inclusive Growth – Poverty, Inequality and Employment*.
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94. <https://doi.org/10.2307/1884513>
- Sri Hartati, Y. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 79–92. <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.74>
- Sukirno, S. (2008). *Makroekonomi Teori Pengantar* (Edisi keti). Rajawali Press.
- Tambunan, T. (2020). Economic Development in Indonesia: Trends and Challenges. *Indonesian Economic Journal*, 31(1), 45–62. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10663-019-09328-w>